

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Kajian komprehensif dan mendalam tentang Tindak Pidana Korupsi dalam tulisan, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Perkembangan Remisi di Indonesia*. Jakarta: Direktur Bina Registrasi, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2006.
- Gunakarya, A. Widiadi. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico. 1988.
- Hadikusumo, Hilman. *Bahan Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. 2005.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- _____, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Oemarmadi, Sarwedi. *Lima Belas Langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia Procurement*. Watch-Hivos, 2005.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co, 2007.

Pradja, R. Achmad.S. Soemadi dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1979.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama, 2006.

Simanjuntak. *Politik dan Praktek Pemasarakatan*. Jakarta: Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM R.I Pusat Pendidikan Pelatihan Pegawai, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

_____, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, Lembar Lepas SEKNEG Tahun 1995.

_____, *Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632.

_____, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan*.

_____, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955 Tentang Tentang Pengurangan Hukuman Khusus*.

_____, *Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223

_____, *Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan*

Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223.

_____, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.*

_____, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.HN.02.01 Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.*

C. Koran dan Internet

Keterangan Emerson Yuntho sebagai Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW). "Teroris dan Koruptor Berhak Remisi". *Kompas*. Sabtu 22 Agustus 2009.

Keterangan Yap Swee Seng, Executive Director Asian Forum for Human Rights and Development, Denpasar, 2010, sebagaimana dikutip oleh KOMPAS.com. (16 Desember 2010)

Keterangan Political & Economic Risk Consultancy, *CPI 2009: Tingkat Korupsi Indonesia Masih Menonjol*, Hongkong, 2010, sebagaimana yang dikutip oleh nusantaranews.wordpress.com, (6 Desember 2010)

Keterangan Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan HAM, *Koruptor Dapat Korting Hukuman* Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, Koruptor Dapat Korting Hukuman sebagaimana yang dikutip dari dutamasyarakat.com, (6 Desember 2010)

<http://www.artikata.com/translate.php> (6 Januari 2011)